

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia sangat cepat pada saat ini terbukti semakin majunya teknologi yang diberikan semakin cepat pula perkembangan yang dilakukan, diantara majunya teknologi kepada sektor sektor penunjang masyarakat menimbulkan dampak positif terhadap kemudahan aktifitas masyarakat, tidak hanya dalam aktifitas masyarakat bahkan teknologi sudah diterapkan oleh instansi pemerintahan salah satunya ialah pada sektor perpajakan. Lembaga pemerintah khususnya perpajakan sudah mulai menggunakannya dengan tujuan memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Adanya teknologi saat ini dan terus mengembangkannya hal ini akan selaras dengan meningkatnya pendapatan negara. Peranan penerimaan negara saat ini sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis untuk peningkatan pembangunan Nasional, hal ini karena tidak mungkin menggerakan suatu pemerintahan atau pembangunan infrastruktur nasional tanpa adanya dukungan dari penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yaitu pada sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak bersifat memaksa untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan umum tanpa adanya timbal balik secara langsung

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan

perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan dalam hal ini pemerintah melalui kantor pelayanan pajak hanya memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan di lapangan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut dari objek pajak sehubungan dengan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang dan badan usaha yang diperoleh di Indonesia salah satunya PPh pasal 21 sebagaimana diatur undang undang nomor 36 tahun 2008. Setiap warga negara wajib membayarkan sebagian dari harta sesuai ketentuan berlaku kepada negara.

Perhitungan yang berlaku total gaji yang dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% / maksimal dari biaya jabatan Rp. 500.000 dan pengurangan lainnya semisal iuran setiap bulan wajib pajak akan menghasilkan netto bulan, setelah menemukan hasil netto bulan akan disetahunkan yang nanti hasilnya akan dikurangi dengan PTKP yang berlaku yaitu peraturan PMK No. 101/PMK.010/2016 Kemudian akan dikenakan tarif pajak penghasilan Pasal 21.

Tabel 1.1

Tarif progresif pajak penghasilan tahun 2019

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK NO. 101/PMK.010/2016)

Telah dihitung besaran pajak penghasilan terutang maka wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan pajaknya atau disebut juga SPT masa dan tahunan. Yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas bahwa dapat di tarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari apa yang sudah ditentukan,

atau dengan kata lain agar penelitian terfokus pada penelitian yang diteliti, penelitian dalam hal ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berpenghasilan tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
2. Mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berpenghasilan tetap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ?
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi di kantor pelayanan pajak pratama malang selatan ?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pelengkap perpustakaan pada kantor pelayanan pajak pratama malang selatan atau DJP Kanwil III dan untuk kemudian hari jika dibutuhkan untuk berbagai tugas kantor pelayanan pajak pratama malang selatan.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 21 pajak pribadi di kantor pelayanan pajak pratama
malang selatan

3. Bagi Penulis Lain

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberi informasi, pengetahuan, dan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

